



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989925, Faksimili 021-7974488

www.kemendes.go.id

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

NOMOR 451 TAHUN 2024

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASITAHUN 2024**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka penetapan keterbukaan informasi publik, dan sesuai ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2024;
- MENGINGAT :**
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - c. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat.

MEMPERHATIKAN : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
- PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.
- KEDUA : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala/Ketua Badan, Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan
 2. Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Ditetapkan di Jakarta pada
Tanggal 7 Maret 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI




Dra. Erlin Chaerlinatun M.
NIP. 19670724 198701 2 001

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT / UNIT / SATKER YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBITAN INFORMASI	TEMPAT DAN WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN / RETENSI ARSIP
					Hard Copy	Rekam	Soft - Copy	
1	Informasi terkait koresponden Sapa Desa	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Bulanan, Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
2	Peraturan tentang Satu Data Bidang Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
3	Informasi yang tercantum dalam Portal SatuData Bidang Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
4	Informasi terkait koresponden Sapa Desa	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Bulanan, Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
5	Peraturan tentang Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
6	Informasi yang tercantum dalam Portal Satu Data Bidang Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan		√		Sesuai Retensi Arsip
7	Dokumen Kebijakan Kementerian yang termuat dalam EJOURNAL KEMENDESA	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Tahunan		√		Sesuai Retensi Arsip
8	Data Kegiatan Desa Cerdas	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
9	Data Lomba Teknologi Tepat Guna	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

10	Peraturan tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
11	Analisis terkait kebutuhan diklat dan pengembangan ASN	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Pusat Pelatihan pegawai	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
12	Peraturan tentang Pengelolaan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Yang Unggul Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Pusat Pelatihan pegawai	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
13	Pedoman penghitungan formasi jabatan fungsional PSM	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional (PPJF)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
14	Peraturan terkait pelatihan masyarakat	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
15	Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat BPSDM	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
16	Tata cara sertifikasi profesi pendamping	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ke-2 Kemendesa PDTT (LSP P2)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
17	Peraturan tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Tenaga Pendamping Profesional	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ke-2 Kemendesa PDTT (LSP P2)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
18	SKKNI Tenaga Pendamping Profesional Berdasarkan SKKNI Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 201 Tahun 2021 tentang Penetapan SKKNI kategori aktifitas jasa professional, ilmiah, dan teknis golongan pokok aktifitas professional, ilmiah dan teknis lainnya untuk jabatan tenaga pendamping Profesional (TPP)	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ke-2 Kemendesa PDTT (LSP P2)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
19	Modul-Modul Pelatihan Masyarakat	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√			Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

20	Modul-Modul Pelatihan TPP	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
21	Video-Video Pembelajaran	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
22	Video Kampanye Informasi	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
23	Petunjuk Teknis/Panduan Produksi Video Pembelajaran Berbasis Komunitas (P3PD)	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
24	Petunjuk Teknis Kurasi Video Pembelajaran (P3PD)	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
25	Petunjuk Teknis Peningkatan Kapasitas Produksi Video Pembelajaran (P3PD)	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
26	Dokumen Skema Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ke-2 Kemendesa PDTT (LSP P2)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
27	Tata cara Penyelenggaraan dan/atau Pelaksanaan Sertifikasi /Uji Kompetensi Jabatan Fungsional PSM	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ke-2 Kemendesa PDTT (LSP P2)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
28	Tata cara permohonan dan Penetapan rekomendasi formasi Jabatan Fungsional PSM	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional (PPJF)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
29	Tata cara penyelenggaraan dan/atau pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional PSM. (Teknis/Penjenjangan/Dasar) oleh lembaga/unit kerja penyelenggara/ pelaksana pendidikan dan/atau pelatihan.	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Pusat Pelatihan Pegawai ASN	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

30	NSPK/Regulasi-Peraturan/Dokumen tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat serta Pelaksanaan JF PSM	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional (PPJF)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
31	Dokumen Skema Sertifikasi JF PSM (Ahli Pertama, Muda, Madya, Utama)	Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dan Swadaya Masyarakat Desa	Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ke-2 Kemendesa PDTT (LSP P2)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
32	Peraturan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
33	Peraturan tentang Rencana Pembangunan Kawasan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
34	Buku Profil 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
35	Buku Profil 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian (KPPK)	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
36	Panduan Advokasi dan Kerjasama Desa Untuk Perhutanan Sosial	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
37	Kepmen Desa PDTT Tentang Indek Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
38	Kepmen Desa PDTT Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
39	Informasi tentang lokus prioritas pembangunan desa dan perdesaan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

40	Pedoman pemberdayaan perempuan dan anak	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
41	Pedoman pemberdayaan masyarakat adat	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
42	Kepmen Desa PDTT Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Sekeratriat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
43	Kepmen Desa PDTT Tentang Pemberian Penghargaan Desa dengan Status Desa Mandiri	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Sekeratriat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
44	Kepmen Desa PDTT Tentang Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Sekeratriat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
45	Informasi tentang status perkembangan desa/IDM	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Sekeratriat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
46	Kepmen Desa PDTT tentang Pedoman ketahanan pangan di Desa	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
47	Kepmen Desa PDTT tentang Panduan penanganan bencana di Desa	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
48	Panduan konvergensi penurunan stunting Desa	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
50	Panduan Desa peduli perlindungan sosial	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

51	Panduan Desa peduli kesehatan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
52	Panduan Desa peduli keluarga	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
53	Panduan pelaksanaan monitoring lanjutan ATS & ABPS sebagai dampak pandemi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
54	Panduan perlinfos di Desa terhadap peningkatan peran perempuan dalam pemenuhan hak anak	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
55	Dokumen perencanaan teknis pembangunan Desa dan perdesaan bidang advokasi dan kerja sama	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
56	Panduan Desa ramah perempuan dan peduli anak	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
57	Panduan kepemimpinan inklusif	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
58	Panduan Desa peduli iklim	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
59	Panduan Desa tanggap bencana	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
60	Panduan Desa peduli penghidupan berkelanjutan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

61	Panduan akuntabilitas sosial di Desa	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
66	Panduan fasilitasi Desa inklusif	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
67	Panduan ketahanan pangan di Desa	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
68	Panduan Indek Desa Membangun	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Advokasi dan Kerjasama	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
69	Panduan Indek Desa	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Advokasi dan Kerjasama	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
70	Surat Pemutakhiran dan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Indek Desa Membangun dan Indek Desa	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Advokasi dan Kerjasama	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
71	Panduan Peringkat Skor dan Status Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Advokasi dan Kerjasama	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
72	Panduan Peringkat Skor dan Status Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Advokasi dan Kerjasama	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
73	Informasi Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
74	Peraturan tentang penetapan BUMDes berbadan hukum	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

75	Peraturan tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
76	Peraturan tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
77	Peraturan tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
78	Kebijakan terkait pengembangan kelembagaan BUMDes	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
79	Peraturan tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal di Kawasan transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
80	Panduan Pendaftaran Badan Hukum BUMDesa /BUM Desa Bersama	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
81	Data BUM Desa dan BUM Desa Bersama yang Berbadan Hukum	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
82	Data BUM Desa dan BUM Desa Bersama Berdasarkan Jenis Usaha	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
83	Lokus Perencanaan Teknis Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
84	Panduan Pendaftaran IPT	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

85	Peta Deliniasi Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
86	Indeks Komposit Ketertinggalan (IKK) Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
87	Persentase Afirmasi Kegiatan/Program Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
88	Kebutuhan Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
89	Data Dokumen Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) / Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
90	Dokumen Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT) Tahun 2023 / Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2023	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
91	Dokumen Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT) Tahun 2024 / Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
92	Informasi Mengenai Kedudukan, Domisili, Beserta Alamat Lengkap dan Kontak Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
93	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
94	Gambaran Umum Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
95	Profil Singkat Eselon 1 dan 2 Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
96	Tugas Dan Fungsi Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

97	Sejarah Singkat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
98	Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Negara Tahun 2021 yang Telah Diperiksa, Diverifikasi dan Telah Dikirimkan Oleh KPK	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
99	Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Negara Tahun 2022 yang Telah Diperiksa, Diverifikasi dan Telah Dikirimkan Oleh KPK	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
100	Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Negara Tahun 2023 yang Telah Diperiksa, Diverifikasi dan Telah Dikirimkan Oleh KPK	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
101	Berita Terkait Pelaksanaan Tugas Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
102	Profil Singkat Eselon 1 dan 2 Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
103	Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Non Pemerintah	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
104	Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Eselon 1 dan 2 Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2021	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
105	Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Eselon 1 dan 2 Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2022	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
106	Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Eselon 1 dan 2 Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2023	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
107	Laporan Kinerja Eselon 1 dan 2 Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2021	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
108	Laporan Kinerja Eselon 1 dan 2 Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2022	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
109	Laporan Kinerja Eselon 1 dan 2 Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2023	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
110	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang Telah di Audit Tahun Anggaran 2021	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

111	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang Telah di Audit Tahun Anggaran 2022	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
112	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang Telah di Audit Tahun Anggaran 2023	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
113	Informasi tentang Peraturan, Keputusan, Kebijakan dan Kerjasama di lingkup Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
114	Rencana Strategis Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2021-2024	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
115	Survey Kepuasan Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2021	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
116	Survey Kepuasan Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2022	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
117	Survey Kepuasan Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2021	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
118	Informasi Terkait Administrasi Kepegawaian di lingkup Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
119	Pegawai Penerima Penghargaan di Lingkup Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
120	Struktur Organisasi	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
121	Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
122	Profil Singkat Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

123	Profil Singkat Wakil Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
124	Pengumuman Tentang Hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian JPT Madya dan JPT Pratama di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2023	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
125	Pengumuman Tentang Seleksi Terbuka Pengisian JPT Madya dan JPT Pratama di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2023	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
126	Pengumuman Tentang Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis Tahun Anggaran 2023	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
127	Pengumuman Tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis Tahun Anggaran 2023	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
128	Informasi terkait administrasi Kepegawaian yang terdiri dari kenaikan pangkat, cuti, pensiun, Kartu istri/Suami, asuransi kesehatan, pension janda/duda, pengembalian tabungan perumahan, izin melanjutkan pendidikan di luar jam kerja, tugas belajar, beasiswa, kartu pegawai, taspen, uang pindah, kenaikan gaji berkala, izin luar negeri	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
129	Statistik PNS Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dipekerjakan/diperbantukan pada kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang lain.	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
130	Pegawai Penerima penghargaan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
131	Daftar Penerima SLKS (Penghargaan) Tahun 2022	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Sepanjang Tahun	√		√	Sesuai Retensi Arsip
132	Informasi tentang Reformasi Birokrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
133	Informasi tentang pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
134	Informasi tentang rencana tindak SPIP	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
135	Informasi tentang Bisnis Proses di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

136	Informasi tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Sepanjang Tahun	√		√	Sesuai Retensi Arsip
137	Informasi tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
138	Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2023 KDPDTT yang telah di audit oleh BPK	Sekretariat Jenderal	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
139	Laporan Barang Pengguna Audited Tahun Anggaran 2023 KDPDTT yang telah di audit	Sekretariat Jenderal	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
140	Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Sekretariat Jenderal	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
141	Paket Pengadaan (Tender/Seleksi/Tender Cepat/Penunjukan Langsung) di LPSE	Sekretariat Jenderal	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
142	Pelatihan Kompetensi PBJP Untuk Pejabat Pengadaan	Sekretariat Jenderal	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
143	Pengumuman Tentag Penyesuaian Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
144	Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik	Sekretariat Jenderal	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
145	Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi, Dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024	Sekretariat Jenderal	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
146	Informasi LPDP Tahap 1	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
147	Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Wilayah Papua	Sekretariat Jenderal	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

148	Informasi Tentang Penghargaan Satya Lencana	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
149	Pemberitahuan Gangguan Layanan	Sekretariat Jenderal	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
150	Informasi Tentang Modus Penipuan	Sekretariat Jenderal	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
151	Laporan & Permohonan Tindak Lanjut Pegawai Tidak Hadir Tanpa Alasan Yang Sah	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
152	Surat Edaran LHKPN Di Lingkungan Kementerian Desa PDTT	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
153	Arahan Pemutakhiran Data Pegawai Pada Aplikasi MyASN	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
154	PK dan PI Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Sepanjang Tahun	√		√	Sesuai Retensi Arsip
155	Laporan Kinerja Kemendes, PDT dan Transmigrasi Tahun 2023	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
156	Rencana Strategis Kementerian 2020-2024	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Sepanjang Tahun	√		√	Sesuai Retensi Arsip
157	Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
158	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran, Rencana Pembangunan, dan Kegiatan Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden Triwulan II Tahun 2023	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
159	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran, Rencana Pembangunan, dan Kegiatan Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden Triwulan III Tahun 2023	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
160	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran, Rencana Pembangunan, dan Kegiatan Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden Triwulan IV Tahun 2023	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

161	Laporan Survey Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
162	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui Penyesuaian	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
160	Nota Kesepahaman Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Inspektorat Jenderal	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
161	Prosedur tentang pengaduan WBS	Inspektorat Jenderal	Inspektorat V	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
162	Peraturan tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal	Inspektorat V	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
163	Prosedur tentang layanan C&C (Conselling & Consultation)	Inspektorat Jenderal	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
164	Prosedur tentang Pengaduan Pungutan Liar	Inspektorat Jenderal	Inspektorat V	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
165	Kebijakan Pengawasan Tahun 2021 - 2024	Inspektorat Jenderal	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
166	Peraturan tentang Tata Cara Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Perencanaan dan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
167	Data Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (RTSP,RSKP,Rembangmas)	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Perencanaan dan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
168	Data Status Kawasan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Perencanaan dan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

169	Data Penempatan Transmigran	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Fasilitas Penempatan dan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
170	Data Status Satuan Permukiman Bina	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
171	Data Hasil Evaluasi Kawasan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
172	Data Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
173	Data Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat pengembangan Satuan Pemukiman & Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
174	Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi Skala 1:50.000	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Perencanaan dan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan			√	Sesuai Retensi Arsip